



# PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, SH No.4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax : 0274 – 367348, Situs: [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)

Pos-el : surat@ pn\_bantul.go.id

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) USULAN KEGIATAN TAHUN 2022

Kementerian/ Lembaga	: Mahkamah Agung Republik Indonesia (005)
Unit Eselon	: Badan Urusan Administrasi (01)
Satker	: Pengadilan Negeri Bantul (400173)
Program	: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (005.01.02)
Sasaran Program	: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan
Indikator Kinerja Program	: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan
Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071)
Sasaran kegiatan	: Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Bantul
Indikator Kinerja Kegiatan	: Pengadaan Sarana genset
Keluaran (output)	: Layanan Internal (overhead) (1071.951)
Indikator Keluaran	: Terlayannya kebutuhan sarana pendukung tupoksi pengadilan
Volume Keluaran (output)	: 1
Satuan Ukur Keluaran	: Layanan

### 1. Latar Belakang

Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan dari kegiatan ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
5. Peraturan Dirjen Anggaran Nomor PER-5/AG/2020 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

## 2. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan mengacu kepada Pendekatan Anggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya dalam sistem penganggaran yang telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya. Bagian Rencana Anggaran sebagai unit perencanaan di Mahkamah Agung RI, sangat penting untuk menilai dan menyusun tingkat penilaian/indikator kinerja yang terukur dari setiap satker. Penyempurnaan dan perubahan yang dilakukan pada setiap tahapan dan proses penganggaran, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan diharapkan akan dapat berjalan dengan baik dan lebih berkualitas.

Pengadilan Negeri Bantul diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan juga dalam rangka mendukung terwujudnya visi badan peradilan yang agung. Dengan demikian, maka perlu ditunjang adanya sarana dan prasarana yang layak dan memadai guna mendukung pelayanan peradilan tersebut. Hal ini sejalan dengan semakin banyaknya masyarakat yang perlu dilayani. Masyarakat pencari keadilan ini berhak mendapatkan pelayanan yang prima yang salah satu indikatornya adalah lengkapnya fasilitas/ sarana prasarana penunjang pelayanan yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri.

Dengan semakin meningkatnya para pencari keadilan yang berasal dari berbagai macam latar belakang dan kondisi membuat instansi pengadilan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik baik dari segi percepatan pelayanan peradilan maupun fasilitas untuk pelayanan publik.

Dalam hal keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, Pengadilan Negeri Bantul masih perlu untuk meningkatkan fasilitas keamanan karena pada saat ini kantor pengadilan **belum** memiliki pos jaga untuk pintu masuk dan atau pintu keluar area kantor pengadilan.

## 3. Gambaran Teknis Singkat

### a. Kondisi Lokasi

Pengadilan Negeri Bantul secara geografis terletak pada bagian selatan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tata guna lahan sebagian besar areal adalah

sawah dan kebun campuran, jumlah penduduk tahun 2016 sebesar 983.527 dengan kepadatan 2.013 jiwa/km<sup>2</sup>. Mata pencaharian penduduk sebagian besar bekerja di bidang perdagangan, industri dan jasa service.

Jumlah perkara perdata yang masuk Pengadilan Negeri Bantul hingga november tahun 2018 adalah 398 perkara, pidana 457 perkara masih ditambah lagi dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Rata-rata pengunjung yang datang ke Pengadilan Negeri Bantul adalah kurang lebih 50-100 orang setiap hari dan jumlah persidangan rata-rata setiap hari adalah 25-30 persidangan.

#### b. Kondisi peralatan sumber tenaga listrik

Kapasitas listrik dari Perusahaan Listrik Negara yang ada pada jaringan di Pengadilan Negeri Bantul untuk sementara ini masih mencukupi kebutuhan. Namun jalur listrik yang melewati kantor pengadilan ini sering mengalami pemadaman, baik melalui pemberitahuan sebelumnya maupun tidak melalui pemberitahuan sebelumnya.

Tenaga cadangan berupa Generator (Genset) yang ada tidak mencukupi kebutuhan listrik dan dalam kondisi tidak rusak. Kemampuan genset hanya 7000 kwh sedangkan kebutuhan listrik kantor pengadilan adalah kisaran 25.000 kwh. Sehingga genset yang ada tidak dapat digunakan.



Gambar tersebut adalah kondisi genset yang ada di Pengadilan Negeri Bantul. Tahun perolehan genset ini adalah tahun 2010, tercatat sebagai aset dengan nama transportable generating set dengan nilai perolehan Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Kondisi riil saat ini adalah rusak, dan apabila dilakukan perbaikan dan dapat berfungsi pun tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk operasional kantor.

#### **4. Sarana dan Prasarana yang diperlukan**

Berdasarkan uraian gambaran diatas maka usulan Anggaran Biaya untuk Tahun Anggaran ini adalah:

- 1. Generator Set (GENSET) dengan kapasitas 100 KVA.**
- 2. Rumah genset.**

#### **5. Uraian Kegiatan**

Indikator Keluaran dan Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

a. Penerima manfaat

Penerima manfaat dari adanya pekerjaan ini adalah:

- Lingkungan internal meliputi para pegawai fungsional, kepaniteraaan, dan kesekretariatan dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat.
- Lingkungan eksternal yaitu masyarakat pencari keadilan, instansi terkait seperti kejaksaan, kepolisian, dan lembaga hukum lain yang bersentuhan langsung dengan pengadilan.

b. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Yaitu kegiatan pengadaan sarana dan prasana di lingkungan mahkamah agung, khususnya di Pengadilan Negeri Bantul

c. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana dan prasarana berupa sarana penyedia cadangan listrik guna pelayanan peradilan terhadap masyarakat.

d. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di kantor Pengadilan Negeri Bantul, jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 4 Kabupaten Bantul, Provinsi DIY.

e. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab:

- Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Panitia pengadaan Pengadilan Negeri Bantul



- Pihak ketiga yaitu penyedia barang dan jasa

## 6. Pencapaian Output

### a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung ini dilakukan melalui anggaran DIP dalam bentuk UP / GUP dan LS.

### b. Tahapan pelaksanaan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan

- 1) Tahapan persiapan meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan rencana anggaran biaya;
- 2) Tahapan pelaksanaan adalah pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana setelah disetujui anggaran;
- 3) Tahapan pelaporan dan evaluasi kegiatan meliputi laporan kegiatan keuangan dan laporan peralatan dan mesin yang telah direalisasikan.

### c. Biaya yang diperlukan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung ini diperlukan dana sebesar Rp. 267.400.000 (*dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus rupiah*)

Rincian lebih lanjut atas kebutuhan dana tersebut akan disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta data dukung lainnya (terlampir)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (TOR) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 27 November 2020  
Sekretaris,



*[Handwritten signature in green ink]*  
Yuyun Fithriyah, S.E., A.k.  
NIP. 197908222005022001